

IMPLEMENTASI PRINSIP PENANDINGAN (*MATCHING PRINCIPLE*) DALAM PERUSAHAAN KONTRAKTOR PT "DKN" DI SURABAYA

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



DIAJUKAN OLEH :
EVI NUR'AINI
No. Pokok : 040338022



**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP PENANDINGAN (*MATCHING PRINCIPLE*)
DALAM PERUSAHAAN KONTRAKTOR PT "DKN" DI SURABAYA**

DIAJUKAN OLEH :

EVI NUR'AINI

No. Pokok : 040338022

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Dr. Hj. SRI ISWATI, SE., M.Si., Ak

NIP. 131 943 803

TANGGAL 25-1-2006

KETUA PROGRAM STUDI,


Drs. M. SUYUNUS MAFIS., Ak

NIP. 131 287 542

TANGGAL 3-2-06

ABSTRAKSI

PT “DKN” merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang tetap beroperasi meskipun keadaan perekonomian saat ini yang kurang stabil. Salah satu ciri khas perusahaan konstruksi adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang umumnya memakan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Ketepatan penggunaan metode dalam pengakuan pendapatan dan biaya berpengaruh terhadap gambaran keberhasilan perusahaan.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan subyek penelitiannya adalah salah satu perusahaan kontraktor di Surabaya.

Berdasarkan penelitian, implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) pada PT “DKN” menunjukkan proses penandingan yang kurang tepat. PT “DKN” mengakui dan melaporkan pendapatan didasarkan atas penyelesaian pekerjaan yang dibayar pemberi proyek, sedangkan biaya didasarkan pada pengeluaran proyek untuk mencapai persentase penyelesaian pekerjaan. Ketidaktepatan lainnya adalah menggunakan metode *cash basis* dalam pengakuan dan pencatatan pendapatan dan *accrual basis* dalam biaya. Penggunaan dasar yang sama dalam mengakui pendapatan dan biaya, membantu perusahaan untuk dapat melakukan implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dengan lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil aalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya hingga penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Prinsip Penandingan (*Matching Principle*) dalam perusahaan kontraktor PT "DKN" di Surabaya dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS., Ak. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak. selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan nasehatnya untuk memberikan bimbingan dengan sabar dan pengertian.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuannya.
5. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah membantu penulis guna kelancaran skripsi ini.

6. Bapak Ir. Nawa Gularso selaku pimpinan PT “DKN” yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap staf dan karyawan PT “DKN” yang turut membantu perolehan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kakak-kakakku, terima kasih atas biaya kuliah dan do’anya hingga skripsi ini selesai.
9. Sahabat baikku, afi, dita, anastasia, yuli, dory, chandra dan hepi yang telah memberikan semangat dan nasehat agar cepat menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik teknik penulisan maupun aspek materinya. Semua itu tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Surabaya, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Manfaat Penelitian	4
1.5.Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Laporan Keuangan	7
2.2. Prinsip Penandingan (<i>Matching Principle</i>).....	9
2.3. Pendapatan	11
2.3.1 Pengertian Pendapatan	11
2.3.2 Pengukuran Pendapatan	13

2.3.3 Pengakuan Pendapatan.....	14
2.4. Metode Pengakuan Pendapatan.....	17
2.4.1 Metode Kontrak Selesai	17
2.4.2 Metode Persentase Penyelesaian.....	18
2.5. Biaya	20
2.5.1 Pengertian Biaya dan Beban	20
2.5.2 Pengukuran Beban	22
2.5.3 Pengakuan Beban	22
2.6. Akuntansi untuk Perusahaan Konstruksi	23
2.6.1 Pengertian Kontrak Selesai	23
2.6.2 Karakteristik Umum Perusahaan Konstruksi	24
2.6.3 Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Kontrak Konstruksi	25
2.6.4 Biaya Kontrak Konstruksi.....	26
2.7. Penelitian Sebelumnya	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Jenis dan Sumber Data	31
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	31
3.4. Teknik Analisis	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	33
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	33

4.1.2 Maksud dan Tujuan Perseroan	33
4.1.3 Kegiatan Usaha Perseroan.....	34
4.4.1 Struktur Organisasi.....	36
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Proses Akuntansi PT “DKN”	37
4.2.2 Implementasi Prinsip Penandingan (<i>Matching Principle</i>) dalam PT “DKN”	38
4.2.2.1 Pengakuan Pendapatan dan Biaya Hasil Pemborongan Pekerjaan Proyek.....	38
4.2.2.2 Beban-beban yang Berhubungan dengan Pendapatan Pemborongan Pekerja.....	48
4.3. Pembahasan.....	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	53
5.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

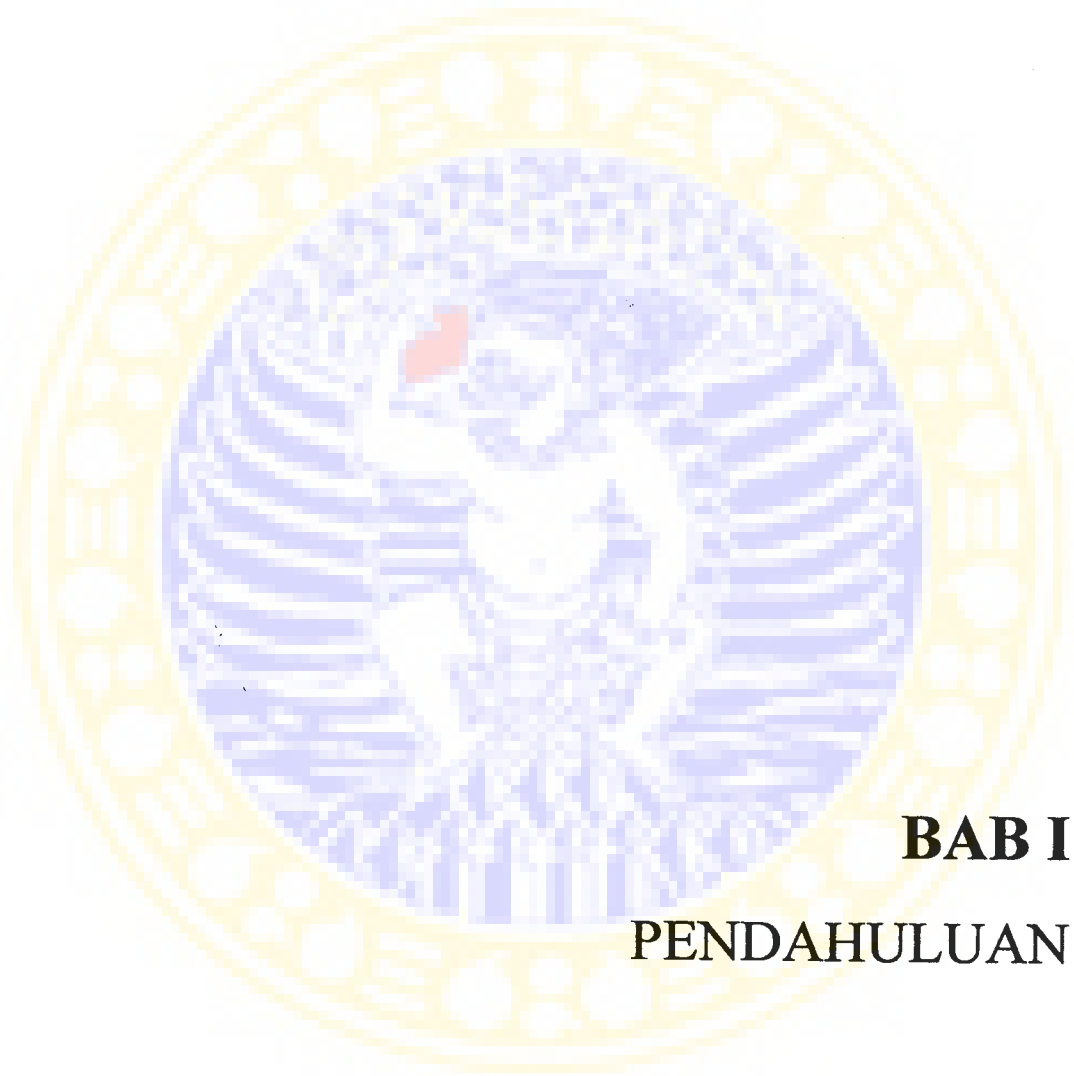
Tabel 4.1 Biaya pelaksanaan proyek tahun 2004	43
Tabel 4.2 Biaya pelaksanaan proyek tahun 2005	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur organisasi perusahaan





BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

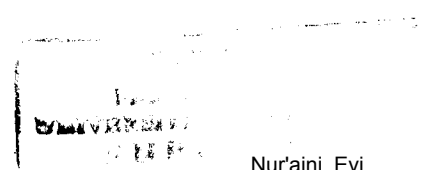
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan dunia usaha semakin meningkat pesat, demikian pula persaingan antar perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Persaingan tersebut terjadi pada berbagai sektor, terlebih lagi saat ini kondisi perekonomian Indonesia mulai tidak menentu dengan adanya krisis ekonomi. Industri konstruksi termasuk salah satu sektor yang terkena imbas dari krisis ekonomi. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, perusahaan harus dapat menjaga kelangsungan usahanya dengan jalan mengefisienkan beban proyek yang akan dikerjakannya agar perusahaan mampu bersaing dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Proyek konstruksi ada yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Apabila ditinjau dari segi akuntansi dengan asumsi bahwa 1 periode akuntansi adalah satu tahun takwim dan proyek yang dilaksanakan pada umumnya memakan waktu lebih dari satu periode akuntansi. Hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam hal pengakuan pendapatan dan beban, karena ketepatan penggunaan metode dalam pengakuan pendapatan dan beban berpengaruh terhadap gambaran keberhasilan perusahaan.

Pendapatan merupakan faktor terpenting untuk mendapatkan laba, oleh karenanya penentuan pendapatan harus dilakukan dengan tepat agar benar-benar mencerminkan hasil usaha dalam satu periode. Meskipun pendapatan merupakan



faktor yang penting untuk memperoleh laba dalam menghitung penghasilan bersih periodik, penentuan pendapatan tidak dapat dipisahkan dari penentuan beban-bebannya. Disinilah peranan akuntansi dirasakan semakin meningkat untuk dapat mengetahui kemampuan usahanya melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk diterapkan secara konsisten.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 2 par 07) laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang umumnya menjadi perhatian para pengguna laporan keuangan karena mencerminkan keberhasilan operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Dua komponen penting dalam laporan laba rugi adalah unsur pendapatan dan beban yang akan diakui dalam suatu periode tertentu. Dalam perusahaan konstruksi, seringkali penyelesaian pekerjaannya melewati lebih dari satu periode tertentu. Oleh karena itu ketepatan perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban akan

berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan. Untuk memenuhi kewajaran laporan keuangan tersebut, maka dalam pengakuan pendapatan dan beban harus menggambarkan prinsip penandingan (*matching principle*) dalam arti penentuan pendapatan dalam suatu periode harus dikaitkan dengan penentuan beban-beban dalam periode yang sama

Berdasarkan prinsip penandingan (*matching principle*) ini, diharapkan laba yang disajikan dalam laporan keuangan adalah wajar. Laporan keuangan dapat dikatakan wajar apabila tidak ada akun yang dinyatakan terlalu besar (*overstated*) atau terlalu kecil (*understated*) dalam jumlah yang material dan pengungkapan yang cukup. Sehingga laporan laba rugi tersebut nantinya dapat dijadikan sumber informasi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Melihat pentingnya perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban terhadap kewajaran laporan keuangan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor PT “DKN” Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

PT “DKN” merupakan perusahaan konstruksi yang kegiatan utamanya adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di samping juga memberikan jasa konsultasi yang berkenaan dengan proyek konstruksi termasuk *engineering* kecuali jasa dan konsultasi bidang hukum. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, PT “DKN” juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Permasalahannya adalah

bagaimana agar pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan oleh PT “DKN” dapat disajikan secara tepat dalam laporan keuangannya. Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor PT “DKN”?
2. Apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor PT “DKN”.
2. Mengetahui kesesuaian prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor PT “DKN” telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan tentang bagaimana implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) pada setiap proyek yang dikerjakan.

2. Bagi penulis adalah untuk menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip penandingan (*matching principle*) yang diperoleh dari perkuliahan.
3. Menambah pengetahuan bagi pihak lain dan sebagai dasar penelitian lebih lanjut bagi yang berminat tentang prinsip penandingan (*matching principle*) khususnya pada perusahaan kontraktor.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, secara garis besar dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan baik yang diperoleh dari perkuliahan maupun literatur yang dijadikan pedoman dalam pembahasan skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang difokuskan pada implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) oleh PT “DKN”, metode analisis

yang digunakan, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum PT “DKN” yang merupakan salah satu perusahaan kontraktor di Surabaya yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi serta pembahasan masalah.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang dapat diambil serta saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi pihak perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laporan Keuangan

Suatu perusahaan apabila menginginkan kegiatan usahanya berjalan dengan sukses, maka perusahaan tersebut hendaknya menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Untuk itu perusahaan memerlukan laporan keuangan, karena dari informasi laporan keuangan tersebut dapat dilihat tentang kemajuan usahanya apakah memperoleh keuntungan atau kerugian. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 2 par 07) disebutkan bahwa :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari laporan keuangan”.

Laporan keuangan berguna bagi pemakai, oleh karena itu harus disajikan secara wajar. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 4 paragraf02) disebutkan bahwa: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. Menurut *Accounting Principle Board* (APB) *Statement* no.4 paragraf 33, seperti kutipan Baridwan (1999:4) mengenai tujuan laporan keuangan ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Tujuan umum laporan keuangan dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari aktivitas-aktivitas dalam rangka memperoleh laba.
3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Informasi keuangan akan bermanfaat apabila ketujuh kualitas yang sesuai dengan tujuan kualitatif laporan keuangan terpenuhi, seperti berikut ini :

1. Relevan.
Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, maka informasi tersebut tidak akan ada gunanya meskipun kualitas-kualitas lainnya terpenuhi.
2. Dapat dimengerti.
Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.
3. Daya uji.
Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat yang subyektif.
4. Netral.
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.
5. Tepat waktu.
Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

6. Daya banding.

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan lainnya pada periode yang sama.

7. Lengkap.

Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif di atas; dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan.

2.2. Prinsip Penandingan (*Matching Principle*)

Paton & Littleton menyebutkan bahwa pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sedangkan biaya merupakan upaya untuk memperoleh hasil tersebut. Karena itu untuk mengukur laba yang tepat, maka pendapatan harus ditandingkan dengan biaya.

Secara operasional penggabungan antara pendapatan dan biaya merupakan proses akuntansi yang terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama: biaya dikapitalisasikan sebagai aktiva yang menunjukkan kumpulan jasa potensial atau yang telah habis dikonsumsi dalam memperoleh penghasilan tersebut. Tahap keduanya adalah: aktiva disusut sebagai biaya untuk mengakui proporsi jasa aktiva potensial yang telah dikonsumsi dalam menciptakan penghasilan periode tersebut. Prinsip penandingan (*matching principle*) menyatakan bahwa beban harus diakui dalam periode yang sama dengan periode pengakuan penghasilan yang bersangkutan.

Menurut Belkoui (2001:53) menyebutkan bahwa: “Penggabungan akan tercapai dengan baik apabila penggabungan tersebut mencerminkan hubungan sebab akibat antara biaya dan penghasilan”. Belkoui (2001:152) juga menyatakan hubungan antara pendapatan dan biaya dalam proses penandingan tergantung pada empat kriteria, yaitu :

1. Mempertemukan langsung harga pokok yang telah habis dikonsumsi dengan suatu penghasilan (misalnya, harga pokok penjualan dipertemukan dengan penjualan yang bersangkutan).
2. Mempertemukan langsung harga pokok yang telah habis dikonsumsi dengan periode (misalnya, gaji pimpinan untuk satu periode).
3. Alokasi harga pokok diatas periode-periode yang memperoleh manfaat darinya (misalnya, penyusutan).
4. Memperlakukan biaya sebagai biaya terhadap semua biaya lainnya dalam periode terjadinya, kecuali pengeluaran biaya tersebut dapat membuktikan bahwa ia mempunyai manfaat di masa mendatang.

Menurut Kam (1990:284), penandingan biaya terhadap pendapatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Penandingan langsung (*direct matching*).

Dilakukan apabila pendapatan memiliki hubungan langsung terhadap biaya yang dikeluarkan. Jadi semua biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode tersebut.

2. Penandingan tidak langsung (*indirect matching/periodic matching*).

Maksudnya biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan harus dibebankan secara periodik. Penandingan ini dapat dilakukan dengan dua cara :

a. Systematic & Rational Allocation

Beban yang ditandingkan tidak mempunyai hubungan sebab akibat terhadap pendapatan yang dihasilkan dan beban tersebut memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Beban yang terjadi harus dialokasikan selama periode pemanfaatan biaya tersebut.

b. Immediate Recognition

Beban tidak berkaitan dengan pendapatan tertentu, tetapi dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa yang secara tidak langsung membantu menghasilkan pendapatan. Selain itu beban selama periode tertentu tidak memberikan manfaat dimasa mendatang secara jelas.

2.3. Pendapatan

2.3.1. Pengertian Pendapatan

Konsep pendapatan sulit dirumuskan karena pada umumnya pengakuan pendapatan dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu, jenis perubahan nilai tertentu, dan kaidah implisit atau diasumsikan untuk menetapkan kapan pendapatan harus dilaporkan.

Ada dua pendekatan terhadap konsep pendapatan, satu di antaranya berfokus pada arus masuk aktiva sebagai hasil kegiatan operasi perusahaan dan yang lainnya berfokus pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyalurannya kepada konsumen atau produsen lainnya. Jadi pendapatan dianggap sebagai arus masuk aktiva bersih atau sebagai arus keluar barang dan jasa.

Definisi pendapatan menurut Yusup (1999:24) adalah “aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa”. Baridwan (1999:30) menguraikan pendapatan sebagai aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* No.6 yang dikeluarkan FASB seperti kutipan Baridwan, pendapatan (*revenue*) adalah “aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembebanan barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No.23 (IAI, 2002: 23.2, par 06) definisi pendapatan adalah sebagai berikut : “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal “.

Definisi pendapatan menurut Hendrikson (1997:120) yang menyebutkan pendapatan sebagai *inflow concept*, yaitu: “Bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan jasa”.

Paton dan Littleton (1940:46) mendefinisikan pendapatan secara berbeda, yaitu “*Revenue is the product of the enterprise, measured by the amount of new assets received from customer, income emerges when the assets which expenses revenue exceed the total of assignable cost* “.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa pendapatan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Sebagai penambahan aset baru yang diterima *customer*.

Pendapatan direalisasi melalui perubahan dari produk menjadi kas ataupun aset lain sehingga setiap penambahan aset baru yang bukan merupakan hasil usaha tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Pendekatan ini menganut *inflow concept*.

2. Sebagai penyerahan barang dan jasa kepada *customer*.

Pendapatan dinyatakan sebagai jumlah uang atas barang atau jasa yang diserahkan perusahaan kepada para *customernya* selama satu waktu tertentu. Pendekatan ini menganut *outflow concept* yang menitikberatkan pada penciptaan barang dan jasa tersebut kepada konsumen atau produsen lain.

3. Sebagai produk perusahaan.

Pendapatan perusahaan selama periode tertentu tersebut merupakan jumlah nilai tukar produk perusahaan.

2.3.2. Pengukuran Pendapatan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.23 (IAI, 2002 : 2.10 par 37) “Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima”.

Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Pengukuran pendapatan dapat dilakukan dengan menggunakan nilai tukar dari barang dan jasa. Nilai tukar ini merupakan ekivalen uang atau nilai sekarang tagihan-tagihan yang diharapkan akan diterima dari transaksi yang mengakibatkan timbulnya pendapatan. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut.

2.3.3. Pengakuan Pendapatan

Prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) yang dikemukakan oleh Kieso & Weygandt (2004:903) menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat :

1. Direalisasi atau dapat direalisasi

Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas (piutang). Pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui.

2. Dihasilkan.

Pendapatan dihasilkan (*earned*) apabila ekuitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.23 mengenai pendapatan (IAI, 2002 : 23.1) yang menyatakan bahwa “Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal”. Standar Akuntansi Keuangan No.34 (IAI, 2002 : 34.5) juga menyatakan, pendapatan diakui pada saat :

1. Direalisasi, bila barang-barang dan jasa yang dipertukarkan untuk kas atau klaim atas kas (utang).
2. Dapat direalisasi, bila aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klaim atas kas yang diketahui.
3. Dihasilkan, bila kesatuan itu sebagian besar telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan dari pendapatan yakni proses mencari laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Menurut Kieso & Weygandt (2004:904) ada empat transaksi pendapatan telah diakui sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan.
2. Pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih.
3. Pendapatan dari memberi kemungkinan bagi pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan seperti bunga, sewa dan royalti diakui pada saat berlalunya waktu atau ketika aktiva itu digunakan.
4. Pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan.

Pada umumnya pengakuan pada saat penjualan (penyerahan) digunakan karena sebagian besar ketidakpastian mengenai proses menghasilkan laba dan harga pertukaran sudah diketahui (*realize*). Akan tetapi dalam situasi tertentu pendapatan diakui sebelum penyelesaian dan penyerahan, contohnya adalah akuntansi untuk konstruksi jangka panjang yang memungkinkan penerapan metode persentase penyelesaian.

Pandangan umum menganggap bahwa pendapatan baru terjadi setelah adanya transaksi penjualan dengan alasan teknis pencatatan, dimana pendapatan harus diakui atau dicatat dan bukan kapan sebenarnya pendapatan terjadi maka dasar yang paling utama adalah saat terjadinya penjualan sebab saat itu pendapatan sudah terbentuk sekaligus terealisasi.

Kieso & Weygandt (2004:908) menyatakan ada dua metode akuntansi yang sangat berbeda untuk konstruksi jangka panjang yang diakui oleh profesi akuntansi, antara lain:

1. Metode persentase penyelesaian.

Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu persentase penyelesaian. Berbagai metode telah digunakan dalam praktek untuk menentukan tingkat kemajuan kearah penyelesaian (*extent of progress toward completion*), yang paling umum adalah :

- a. Metode biaya terhadap biaya (*cost-to-cost method*), dimana tingkat penyelesaian ditentukan dengan membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan

dengan taksiran terbaru mengenai jumlah total biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan proyek.

- b. Metode upaya yang diperluas (*efforts expended method*), dimana tingkat penyelesaian diukur berdasarkan ukuran tertentu dari pekerjaan yang dilaksanakan.
 - c. Metode unit pekerjaan yang dilaksanakan (*units of work method*), dimana tingkat penyelesaian diukur berdasarkan unit yang dihasilkan dan penambahan nilai.
2. Metode kontrak selesai.

Pendapatan dan laba kotor diakui pada saat kontrak diselesaikan.

2.4. Metode Pengakuan Pendapatan

2.4.1. Metode Kontrak Selesai.

Tjahyadi & Dewantoro (1995:31) menyatakan bahwa: “Metode kontrak selesai dirancang untuk mengakui pendapatan setiap proyek hanya pada saat konstruksi telah selesai atau hampir selesai seluruhnya (*substantially complete*)”.

Suatu kontrak konstruksi dapat dikatakan hampir selesai seluruhnya bila biaya-biaya yang tersisa untuk menyelesaikan kontrak tersebut sudah tidak berarti besarnya dibandingkan dengan biaya kontrak yang hampir selesai sebagai suatu kontrak yang selesai adalah untuk mencegah penundaan-penundaan kegiatan-kegiatan akhir tertentu sampai periode berikutnya.

Kieso & Weygandt (2004:913) menyebutkan bahwa: “pada metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak diselesaikan”. Biaya kontrak jangka panjang dalam proses penagihan tahun berjalan telah diakumulasikan, tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan interim ke akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya dan laba kotor.

Keunggulan utama metode ini adalah bahwa pendapatan yang dilaporkan didasarkan atas hasil akhir dan bukan atas estimasi pekerjaan yang belum dilaksanakan. Kelemahan utamanya adalah bahwa metode ini tidak mencerminkan kinerja masa berjalan apabila metode kontrak mencakup lebih dari satu.

Metode kontrak selesai harus digunakan hanya (1) jika suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek, atau (2) jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi, atau (3) jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak itu diluar risiko bisnis yang normal dan berulang. Asumsinya adalah bahwa metode persentase penyelesaian merupakan metode yang lebih baik dan metode kontrak selesai hanya akan digunakan jika metode persentase penyelesaian dianggap tidak tepat.

2.4.2. Metode Persentase Penyelesaian

Tjahyadi & dewantoro (1995:31) menyatakan bahwa: “Metode persentase penyelesaian dirancang untuk mengakui pendapatan setiap kontrak dengan perkembangan pekerjaan”.

Pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap periode didasarkan atas kemampuan dalam pembayaran, yaitu persentase penyelesaian. Pengakuan pendapatan harus dihubungkan dengan beberapa ukuran, sehingga dapat mengestimasi secara wajar persentase pekerjaan yang telah diselesaikan dalam hubungannya dengan total pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kontrak.

Menurut Lucas (1973:16), indikator yang paling umum digunakan adalah persentase biaya sampai tanggal saat ini dihubungkan dengan total estimasi biaya. Dalam menghitung dengan persentase penyelesaian, biaya sampai tanggal ini tidak termasuk kelebihan material persediaan di alokasi proyek mendatang kecuali jika biaya-biaya tersebut jumlahnya tidak material.

Keunggulan metode ini adalah dapat dipergunakan oleh perusahaan kontraktor yang mempunyai proyek bersifat jangka panjang. Salah satu penyebabnya, metode ini memungkinkan diterapkannya prinsip penandingan antara biaya dengan pendapatan secara periodik, sehingga terdapat pengakuan laba atau rugi periodik selama masa pembangunan suatu proyek. Kekurangan metode ini adalah banyak mempergunakan taksiran, dimana taksiran ini sendiri belum tentu tepat karena ada banyak faktor yang mungkin menghambat pekerjaan, misalnya perubahan cuaca dan krisis ekonomi.

Profesi akuntan menurut Kieso & Wegandt (2004:908), mewajibkan bahwa metode persentase penyelesaian harus digunakan apabila estimasi kemajuan ke arah penyelesaian, pendapatan serta biaya secara layak dapat dipercaya dan semua syarat berikut ini terpenuhi:

1. Kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang akan diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan, serta cara dan syarat penyelesaian.
2. Pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban kontrak.
3. Kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tersebut.

Baik metode kontrak selesai maupun persentase penyelesaian dapat diterima dalam akuntansi, akan tetapi itu tidak berarti bahwa akuntan atau kontraktor dapat memilih metode mana yang disukai.

Pemilihan metode harus dikaitkan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Konsistensi juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pengakuan pendapatan untuk kontrak-kontrak yang sama. Ada juga kemungkinan bagi kontraktor untuk menggunakan kombinasi dua metode itu dan tetap konsisten, namun hal tersebut jarang ditemui.

2.5. Biaya

2.5.1. Pengertian Biaya dan Beban

Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Biaya digunakan sebagai persamaan kata beban (*expense*) karena secara makna bahasa berarti pengorbanan

ekonomi untuk mencapai tujuan akhir (penyerahan barang atau jasa agar menjadi pendapatan) dan bukan tujuan antara potensi jasa untuk menghasilkan produk.

Biaya diukur dengan satuan moneter yang harus dibayar untuk memperoleh barang dan jasa. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar dapat menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi organisasi di masa yang akan datang. Keuntungan atau manfaat tersebut biasanya berupa pendapatan yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.

Menurut Usry (1992:19) konsep dan istilah biaya telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Para akuntan mendefinisikan biaya sebagai berikut: “ Suatu nilai tukar, prasyarat, atau pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat”. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau masa mendatang.

Istilah biaya (*cost*) seringkali digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban (*expense*). Namun beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar barang dan jasa, yang akan dibebankan pada atau ditandingkan (*matched*) dengan pendapatan (*revenue*) untuk menimbulkan laba.

Menurut PSAK (IAI, 2002 : 18 par 70) menyebutkan bahwa: “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal “.

Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian mencerminkan akun lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan.

2.5.2. Pengukuran Beban

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya beban diukur berdasarkan *historical cost*, yaitu nilai tukar barang atau jasa pada saat barang atau jasa diperoleh.

2.5.3. Pengakuan Beban

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 23 par 95) menyatakan bahwa: “Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal”. Dalam laporan laba rugi, beban diakui atas dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dengan penghasilan tertentu yang di dapatkan dari transaksi yang sama atau peristiwa yang sama (*matched*).

Seperti yang dikemukakan di atas, berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi bilamana pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa

depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

Biaya adalah kewajiban pelaksana proyek yang harus dibayar kepada pihak-pihak terkait dalam rangka proses pelaksanaan pekerjaan. Menurut PSAK (IAI, 2002: 34.13), biaya kontrak konstruksi terdiri atas :

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi jasa sesuai isi kontrak.

2.6. Akuntansi untuk Perusahaan Konstruksi

2.6.1. Pengertian Kontrak Konstruksi

Perusahaan kontraktor mulai melakukan kegiatannya setelah menerima tender berupa kontrak konstruksi dari pihak pemberi proyek untuk membangun suatu bangunan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 34.1) kontrak konstruksi adalah “Suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok”.

Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti: jembatan, bangunan dan jalan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain

dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan dari pembangunan pokok. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.34 (IAI, 2002 : 34.3) kontrak konstruksi meliputi:

1. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya; pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek.
2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

2.6.2. Karakteristik Umum Perusahaan Konstruksi

Menurut Tjahyadi & Dewantoro (1995:24) akuntansi perusahaan konstruksi mempunyai keunikan-keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan praktek-praktek akuntansi pada perusahaan industri atau jasa lainnya. Keunikan-keunikan itu disebabkan karena keunikan perusahaan konstruksi itu sendiri, yaitu :

1. Proyek konstruksi biasanya dilaksanakan jauh dari kantor pusat perusahaan konstruksi. Hal ini menimbulkan masalah-masalah pengumpulan, pemrosesan dan penggunaan data akuntansi yang relevan secara efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut ada kenyataan bahwa akuntansi awal yang ada dilokasi proyek harus dikumpulkan oleh orang-orang teknik, yang karena terlalu berorientasi pada teknik konstruksi sering mengabaikan nilai akuntansi dan prosedur-prosedurnya. Hasilnya adalah kurangnya data akuntansi yang diperlukan.

2. Karena proyek merupakan satuan dasar (*basic unit*) maka metode akuntansinya mengarah pada "*job cost accounting*". Dibandingkan dengan metode akuntansi

yang lain, yaitu "*process cost accounting*", maka "*job cost accounting*" lebih memerlukan praktek-praktek yang dapat ditelusuri untuk setiap proyek (*job*). Faktor ini digabungkan dengan kesulitan dalam mengumpulkan dan menelusuri data biaya telah menciptakan masalah akuntansi yang unik.

3. Seringkali proyek konstruksi berlangsung lebih dari satu tahun. Oleh karena itu industri menggunakan "*long term contract method*" dalam mengakui pendapatannya. "*long term contract revenue recognition methods*" hanya salah satu contoh dari berbagai metode dan praktek akuntansi alternatif yang dapat ditemui.

2.6.3. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Kontrak Konstruksi

Pendapatan kontrak menurut Asiyanto (2003:22) adalah " nilai hasil kerja pelaksana proyek yang telah diakui *Owner* atau yang mewakili berdasarkan kontrak dan persyaratan lain yang dinyatakan dengan uang.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.34 (IAI, 2002 : 34.3) pendapatan kontrak suatu perusahaan kontraktor terdiri atas :

1. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak.
2. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Pengukuran pendapatan kontrak didasarkan atas nilai wajar dari imbalan yang diterima, dimana pengukuran tersebut dipengaruhi oleh

berbagai macam ketidak pastian yang tergantung pada peristiwa di masa mendatang.

2.6.4. Biaya Kontrak Konstruksi

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.34 (IAI, 2002 : 34.3) anggaran biaya kontrak adalah “suatu proses penghitungan volume pekerjaan, harga berbagai macam bahan material dan pekerjaan yang akan dilakukan pada suatu kontrak konstruksi”. Dengan kata lain, anggaran biaya kontrak konstruksi merupakan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun suatu proyek. Besarnya biaya proyek merupakan dasar bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan mengenai penentuan harga penawaran dan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan proyek.

Biaya konstruksi menurut Asiyanto (2003:26) dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

a. Biaya langsung

Biaya langsung adalah seluruh biaya yang berkaitan langsung dengan fisik proyek, yaitu meliputi seluruh biaya dari kegiatan yang dilakukan diproyek dan biaya mendatangkan seluruh sumber daya yang diperlukan oleh proyek tersebut.

b. Biaya tidak langsung

Biaya tidak langsung adalah seluruh biaya yang terkait secara tidak langsung, yang dibebankan kepada proyek. Biaya ini biasanya terjadi diluar proyek.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002 : 34.5) biaya kontrak konstruksi antara lain:

1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut
 - d. Biaya pemindahan sarana peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan proyek
 - e. Biaya penyewaan sarana dan peralatan
 - f. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut
 - g. Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan proyek tertentu
 - c. Biaya-biaya overhead konstruksi

3. Biaya yang tidak dapat diatribusikan ke aktivitas kontrak atau tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya kontrak konstruksi. Biaya-biaya semacam ini meliputi:
- a. Biaya administrasi umum yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak
 - b. Biaya pemasaran umum
 - c. Biaya riset dan pengembangan yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak
 - d. Penyusutan sarana dan peralatan yang menganggur yang tidak digunakan pada kontrak tertentu

2.7. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai prinsip penandingan (*matching principle*) telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Inna Mutmainnatti yang melakukan penelitian pada perusahaan kontraktor CV “X” di Surabaya tahun 1996. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa CV “X” tidak menerapkan prinsip penandingan (*matching principle*) dengan tepat, sehingga penilaian dan keputusan yang diambil juga menjadi tidak tepat.

Penelitian lain dilakukan oleh Elisa Utari tahun 2001 dengan judul “Penerapan the *Matching Principle* dan Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Kontraktor (Studi kasus pada CV “X” di Kediri), sebenarnya masih ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis lain yang intinya juga mengenai prinsip penandingan

(matching principle) yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang prinsip penandingan (*matching principle*) yang dilakukan pada perusahaan kontraktor, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya.





BAB III

METODE PENELITIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang meneliti tentang implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan dan tujuan penelitian. Menurut Yin (2003:1), pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian berdasarkan sebagai berikut : “secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata”.

Penelitian dilaksanakan pada sebuah perusahaan kontraktor yang merupakan perusahaan jasa konstruksi yang disamping melaksanakan pekerjaan kontrak konstruksi juga memberikan jasa konsultan, perencanaan dan pengawasan proyek konstruksi. Obyek yang diteliti adalah bagaimana implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor PT “DKN” apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan prinsip penandingan (*matching principle*).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dipergunakan adalah data kualitatif, yang didalamnya tidak memuat perhitungan yang berupa penjelasan atau keterangan dari pihak perusahaan mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan data lainnya.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer.

Data yang berkaitan langsung dengan penelitian yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait mengenai keadaan dan gambaran umum perusahaan.

2. Data sekunder.

Data yang diperoleh penulis dari perusahaan yang berupa data olahan perusahaan tersebut dan dari literatur-literatur serta pengetahuan penulis.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara yang dianggap relevan yang meliputi beberapa langkah untuk mengetahui, mengevaluasi dan memecahkan rumusan masalah yang berkaitan dengan implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam perusahaan kontraktor. Langkah atau prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Survey Pendahuluan

Survey ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum perusahaan dan mencari permasalahan yang ada untuk diteliti dan dibahas.

2. Study Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, interview baik dengan karyawan maupun pimpinan perusahaan.

3.4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis data untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi prinsip penandingan yang terjadi dalam perusahaan.
2. Melakukan perbandingan berkenaan dengan implementasi prinsip penandingan yang ada dalam perusahaan dengan literatur serta teori yang berhubungan.
3. Mengambil kesimpulan serta memberikan saran yang sekiranya dapat membantu perusahaan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan yang menjadi obyek penulisan skripsi ini berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT “DKN” melalui akta notaris NY. Yvonne Iskandar SH. Nomor 67 tanggal 18 April 1995 dan diperbaharui dengan akta perubahan tertanggal 19 september 1996 Nomor 52 yang dibuat dihadapan notaris yang sama di Jl. Kayun No.20F Surabaya.

Akta pendirian dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. dalam surat keputusan Nomor C2-390.HT.01.01.TH.97. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Nomor 80 oleh Rina Rustianing Warni SH. selaku notaris di Surabaya mengenai perubahan modal dasar perseroan. Kedudukan serta kantor perusahaan tersebut berada di Jl. Anusanata No.18 Sawotratap Gedangan-Sidoarjo.

4.1.2. Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar yang disahkan oleh notaris adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha bidang bangunan pada umumnya termasuk pemborong, perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembuatan gedung, rumah, jalan,

jembatan, landasan, dam-dam irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi.

- b) Menjadi leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan.
- c) Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian termasuk pabrik-pabrik pengolahan hasil pertanian, *home industry*, dan hasil lain serta memasarkan hasil-hasil produksinya.
- d) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya, baik pengangkutan penumpang maupun barang.
- e) Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi pada umumnya termasuk *engineering*, jasa perbengkelan, persewaan alat-alat berat, kecuali jasa dan konsultasi bidang hukum.

4.1.3. Kegiatan Usaha Perseroan

PT “DKN” adalah perusahaan kontraktor yang melakukan pekerjaan pembangunan (proyek) yang dipercayakan oleh pemberi proyek kepadanya. Perusahaan tersebut dalam mengerjakan proyek berdasarkan kontrak kerja yang diperoleh perusahaan melalui lelang pekerjaan baik dari pemerintah atau pihak swasta, namun tidak menutup kemungkinan proyek yang diperoleh perusahaan tidak melalui lelang pengerjaan proyek tetapi melalui penunjukan langsung dari pihak pemberi proyek. Penunjukan langsung oleh pihak pemberi proyek biasanya

berdasarkan kualifikasi tertentu, misalnya pihak pemberi proyek sudah pernah menyerahkan pengerjaan proyek sebelumnya kepada perusahaan dan hasilnya memuaskan sehingga pihak pemberi proyek menyerahkan kembali proyek lain kepada perusahaan yang sama. Perusahaan memperoleh pengerjaan proyek dengan prosedur seperti berikut :

1. Mengikuti lelang pekerjaan (tender)

Tender dapat diikuti oleh umum dan terbuka bagi setiap pemborong yang berminat terhadap pengerjaan proyek yang ditawarkan. Pemborong dalam hal ini perusahaan kontraktor membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan dalam tender.

2. Melalui penunjukan langsung oleh pemberi proyek

Penunjukan langsung didasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu misalnya kualifikasi dari pemborong. Perolehan pekerjaan melalui penunjukan langsung biasanya didapat dari proyek pemerintah daerah setempat.

Secara garis besar urutan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan sejak kontrak kerja diterima sampai selesai kemudian diserahkan kepada pemberi proyek adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan mendapatkan surat pernyataan dari pemberi proyek yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenangkan tender pengerjaan proyek melalui lelang pekerjaan.
2. Dibuat surat perjanjian antara pemberi proyek dan pemborong disertai lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui.

3. Setelah itu perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi kapan pekerjaan mulai dilaksanakan, batas waktu penyelesaian, syarat-syarat pekerjaan, lingkup pekerjaan, harga kontrak dan cara pembayaran beserta ketentuan mengenai sanksi dan denda.
4. Setelah Surat Perintah Kerja (SPK) keluar, barulah perusahaan melaksanakan pekerjaan sesuai gambar seperti dalam surat perjanjian yang telah dibuat.
5. Pada saat pengerjaan proyek telah mencapai 100%, maka dibuat Berita Acara Penyerahan (BAP) pekerjaan yang pertama.
6. Setelah masa pemeliharaan berakhir, biasanya tiga bulan (90 hari kalender) sesudah penyerahan Berita Acara Penyerahan (BAP) yang pertama, kemudian dibuat Berita Acara Penyerahan (BAP) yang kedua.
7. Setelah Berita Acara Penyerahan (BAP) pekerjaan yang kedua selesai dibuat dan telah disetujui, maka selesailah tugas perusahaan dalam hal pelaksanaan pekerjaan proyek yang dipercayakan kepadanya.

4.1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran pendelegasian tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian agar dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya, dan diharapkan dapat tercapai suatu sistem kerja yang baik. Dengan adanya struktur organisasi, maka pimpinan dapat melakukan koordinasi dan pengontrolan setiap bagian sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT "DKN" dipimpin oleh seorang direktur yang mempunyai fungsi sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan kelangsungan usaha perusahaan. Direktur dibantu oleh satu kepala bagian akuntansi dan dua kepala divisi yaitu divisi kontraktor dan divisi arsitektur.

Kepala bagian akuntansi bertanggung jawab untuk memeriksa kebenaran pencatatan transaksi keuangan yang dibuat oleh bagian yang berada dibawahnya (staff), memeriksa kebenaran pengeluaran dan pemasukan kas perusahaan dan menyelesaikan semua tugas yang berhubungan dengan kelancaran transaksi keuangan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, kepala bagian akuntansi dibantu oleh staff administrasi/keuangan.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Proses Akuntansi PT "DKN" secara Garis Besar

PT "DKN" dalam mengakui pendapatannya berdasarkan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan termin yang diterima perusahaan (*cash basis*). Pendapatan diakui berdasarkan persentase pekerjaan yang dibayar oleh pemberi proyek, dan pengakuan pendapatannya adalah saat terjadinya penagihan termin yang diterima.

Pengakuan beban didasarkan pada jumlah beban yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan (*accrual basis*), bukan pada jumlah yang dikeluarkan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai termin yang diterima dari pemberi proyek.

4.2.2. Implementasi Prinsip Penandingan (*matching principle*) dalam PT “DKN”

Implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam PT “DKN” penulis batasi hanya untuk pendapatan utama perusahaan yang diperoleh dari hasil pemborongan pekerjaan proyek, sedangkan pembebanan beban proyeknya meliputi beban proyek langsung dan beban proyek tidak langsung yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

4.2.2.1. Pengakuan Pendapatan dan Biaya Hasil Pemborongan Pekerjaan Proyek.

Bidang usaha yang ditangani oleh PT “DKN” sejak didirikan tahun 1995 masih terbatas pada bidang bangunan pada umumnya yaitu pemborongan pekerjaan meskipun dalam akta notaris disebutkan beberapa bidang usaha lain.

PT “DKN” dalam mengakui pendapatan yang berasal dari pemborongan pekerjaan menggunakan metode persentase penyelesaian secara fisik dan dalam prakteknya pendapatan tersebut dikelompokkan dalam satu perkiraan yaitu pendapatan kontrak. Pencatatan atau pengakuan pendapatan adalah pada saat diterima penagihan termin sebesar uang kas yang diterima dari pihak pemberi proyek.

Secara pasti nilai kontrak pemborongan pekerjaan proyek sudah diketahui sebelum penyelesaian dan penyerahan pekerjaan proyek kepada pemberi kerja karena nilai kontrak yang akan diterima telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kontrak perjanjian. Pembayaran nilai kontrak yang disepakati dilakukan berdasarkan termin sesuai dengan prestasi yang telah dicapai perusahaan seperti yang tercantum dalam kontrak.

Beban proyek langsung dan Beban proyek tidak langsung dapat dibebankan pada suatu perkiraan yaitu konstruksi dalam penyelesaian begitu beban terjadi dan dicatat :

Konstruksi dalam penyelesaian	Rp xxx
Macam-macam beban kredit	Rp xxx

PT “DKN” berhak mengadakan penagihan termin sesuai kontrak yang ditetapkan pada saat kemajuan pekerjaan telah mencapai tingkat penyelesaian dengan persentase tertentu dan pada saat penagihan termin tersebut dibayar oleh pemberi proyek, maka akan dicatat :

Kas	Rp xxx
Pendapatan kontrak	Rp xxx

Besarnya pendapatan kontrak yang diakui tergantung dari syarat perjanjian pembayaran termin dan uang muka dari pihak pemberi proyek, dalam prakteknya ditemui dua macam bentuk syarat pembayaran termin yaitu:

- (a) Pembayaran uang muka dari pemberi proyek diangsur secara bertahap sebanyak pelaksanaan pembayaran termin.

Uang muka yang diterima pada awal pelaksanaan proyek dicatat sebagai uang muka proyek sampai saat diangsurnya hingga saat diangsurnya yaitu saat pembayaran termin. Sedangkan besarnya pendapatan kontrak yang akan dicatat saat penagihan termin adalah sebesar rupiah yang tercantum dalam perjanjian sebelum dikurangi angsuran uang muka proyek.

(b) Pembayaran uang muka dari pemberi proyek berupa persentase yang dipotongkan pada saat persentase penyelesaian fisik proyek.

Uang muka proyek dicatat sebagai pendapatan kontrak tanpa dilakukan penyelesaian diakhir periode, sedangkan pendapatan kontrak yang akan dicatat adalah sebesar tingkat persentase tertentu yang sudah tidak termasuk angsuran uang muka proyek.

Pada akhir periode akuntansi apabila pekerjaan pembangunan masih terus berlanjut, maka PT "DKN" mengadakan *cut off* hanya atas beban dengan memperhatikan laporan kemajuan pekerjaan yang telah disetujui direktur proyek, serta mempertimbangkan tingkat penagihan termin yang telah dilakukan dan akan dilakukan selanjutnya.

Dasar pengakuan pendapatan adalah *cash basis*, sehingga tidak diadakan *cut off* atas pendapatan yang berasal dari penagihan termin yang dilakukan atau yang akan dilakukan selanjutnya. Akibat yang ditimbulkan dari pengakuan pendapatan tersebut adalah pendapatan yang dilaporkan tahun yang bersangkutan terlalu rendah (*understated*) karena adanya persentase penyelesaian yang seharusnya sudah diakui sebagai pendapatan tetapi oleh perusahaan belum diakui sebab belum dibayar oleh pemberi proyek serta tidak dikoreksi pada akhir periode akuntansi.

Cut off atas pembebanan beban berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan yang dicapai sampai akhir periode, apabila tingkat kemajuan pekerjaan lebih besar dari tingkat penagihan termin yang sudah dilakukan tetapi tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai lebih mendekati tingkat penagihan termin yang

dilakukan. Hasil *cut off* dalam keadaan demikian adalah dengan menurunkan beban proyek yang telah dicatat dengan cara mengurangi beban proyek dengan hasil kali antara anggaran biaya pelaksanaan dengan selisih tingkat kemajuan pekerjaan dengan dasar *cut off* nya dan akan dicatat:

Beban dibayar dimuka	Rp xxx
Konstruksi dalam penyelesaian	Rp xxx

Keadaan lain dimana tingkat kemajuan pekerjaan lebih dekat pada tingkat penagihan termin yang akan dilakukan selanjutnya, maka dasar *cut off* menggunakan tingkat penagihan termin selanjutnya dengan cara menaikkan beban proyek. Kenaikan beban proyek dilakukan dengan cara menambahkan hasil kali antara anggaran biaya pelaksanaan dengan selisih yang terjadi antara tingkat kemajuan pekerjaan dengan dasar *cut off* nya yang akan dicatat:

Konstruksi dalam penyelesaian	Rp xxx
Beban yang masih harus dibayar	Rp xxx

Penulis akan menguraikan melalui contoh proyek yang telah dikerjakan oleh PT “DKN” agar diperoleh gambaran mengenai praktek akuntansi dalam menetapkan pendapatan. Proyek yang dikerjakan oleh PT “DKN” adalah proyek “X” yang diperoleh melalui tender dan telah dikerjakan dalam tahun anggaran 2004/2005. Data-data yang berhubungan dengan proyek tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Proyek ini dikerjakan mulai Juli 2004 sampai dengan Mei 2005.
- B. Harga kontrak Rp 1.020.926.000

C. Rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek adalah sebesar Rp 928.115.000 dengan perincian sebagai berikut:

Biaya proyek langsung	Rp 816.741.200
Biaya proyek tidak langsung	<u>Rp 111.373.800</u>
	<u><u>Rp 928.115.000</u></u>

D. Pembayaran harga kontrak pekerjaan diatur secara bertahap sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka:

Pembayaran uang muka sebesar 20% dari harga kontrak, dalam angsuran ini dibayarkan sebesar Rp 204.185.200

2. Pembayaran termin pertama:

Pembayaran termin pertama sebesar 16% dari harga kontrak Rp 163.348.160 yang dibayarkan setelah persentase penyelesaian pekerjaan fisik mencapai 25%

3. Pembayaran termin kedua :

Pembayaran termin kedua sebesar 16% dari harga kontrak Rp 163.348.160 yang dibayarkan setelah persentase penyelesaian pekerjaan fisik mencapai 45%

4. Pembayaran termin ketiga:

Pembayaran termin ketiga sebesar 16% dari harga kontrak Rp 163.348.160 yang dibayarkan setelah persentase penyelesaian pekerjaan fisik mencapai 65%

5. Pembayaran termin keempat:

Pembayaran termin keempat sebesar 16% dari harga kontrak Rp 163.348.160 yang dibayarkan setelah persentase penyelesaian pekerjaan fisik mencapai 85%

6. Pembayaran termin kelima:

Pembayaran termin kelima sebesar 11% dari harga kontrak Rp 112.301.860 yang dibayarkan setelah persentase penyelesaian pekerjaan fisik mencapai 100% dan telah dilaksanakan penyerahan pekerjaan tahap pertama

7. Pembayaran termin keenam:

Pembayaran termin keenam sebesar 5% dari harga kontrak Rp 51.046.300 yang dibayarkan setelah selesainya masa pemeliharaan yaitu 180 hari terhitung sejak penyerahan pertama oleh kontraktor dan telah dilaksanakan penyerahan pekerjaan tahap kedua.

- E. Persentase fisik penyelesaian pekerjaan sesuai dengan laporan kemajuan proyek sebesar 50% pada akhir tahun 2004 dan 100% pada bulan Mei 2005.
- F. Sebagai jaminan kepada pihak pemberi proyek. PT "DKN" menetapkan penangguhan/penahanan termin sebesar 5% pada setiap penagihan.
- G. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan proyek dalam tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2

TABEL 4.1
Biaya Pelaksanaan Proyek
Tahun 2004

	Biaya langsung proyek (Rp)	Biaya tidak langsung proyek (Rp)	Akumulasi biaya (Rp)	Persentase penyelesaian (%)
Juli	56.168.420	9.063.580	65.232.000	
Agustus	72.563.885	14.256.190	152.052.075	
September	93.531.472.	15.176.753	260.760.300	25%
Oktober	53.484.985	6.978.965	321.224.250	
Nopember	112.560.220	17.540.310	451.324.780	45%
Desember	45.751.283	4.749.284	501.825.347	50%

Sumber: Intern PT "DKN"

TABEL 4.2
Biaya Pelaksanaan Proyek
Tahun 2005

	Biaya langsung proyek	Biaya tidak langsung proyek	Akumulasi biaya	Persentase penyelesaian (%)
2004			501.825.347	50%
Januari	130.825.743	18.167.506	650.818.596	65%
Februari	125.680.342	11.347.968	787.846.906	
Maret	42.865.970	3.463.870	834.176.746	85%
April	38.665.798	2.421.677	875.264.221	
Mei	89.658.745	11.892.034	976.815.000	100%

Sumber: Intern PT "DKN"

Berdasar data-data yang ada pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, maka PT "DKN" mencatatnya sebagai berikut:

Tahun 2004

Uang muka proyek yang diterima pada awal pelaksanaan proyek sesuai syarat perjanjian pembayaran termin dicatat:

Kas	Rp 204.185.200
Pendapatan kontrak	Rp 204.185.200

Pada bulan September saat persentase penyelesaian pekerjaan secara fisik telah mencapai 25% dengan beban-beban yang telah dikeluarkan sampai dengan tingkat penyelesaian dicatat sebagai:

Konstruksi dalam penyelesaian	Rp 260.760.300
Macam-macam beban kredit	Rp 260.760.300

Penagihan termin pertama sebesar yang telah dilakukan pada saat itu dicatat:

Kas	Rp 163.348.160
Pendapatan kontrak	Rp 163.348.160

Pendapatan kontrak sejumlah Rp 163.348.160 didalamnya sudah tidak termasuk angsuran uang muka dan penahanan termin sebesar 5%. Persentase penyelesaian fisik yang mencapai 25% pada termin pertama tidak semuanya dapat ditagih, artinya harus dikurangi terlebih dahulu sebesar 5% sebagai jaminan untuk biaya pemeliharaan bangunan. Termin 16% dari harga kontrak dihitung dengan cara:

Persentase penyelesaian pekerjaan fisik pada penahanan termin pertama	25%
Persentase pekerjaan yang ditahan terminnya	<u>5%</u>
	20%
Angsuran uang muka penahanan termin pertama	<u>4%</u>
	<u>16%</u>

Pada bulan Nopember, persentase penyelesaian pekerjaan telah mencapai 45%, beban yang telah dikeluarkan sampai bulan tersebut adalah sebesar selisih beban pada tingkat penyelesaian 45% dengan beban yang dikeluarkan pada tingkat penyelesaian 25% dan akan dicatat:

Konstruksi dalam penyelesaian	Rp 451.324.780
Macam-macam beban kredit	Rp 451.324.780

Penagihan pembayaran termin kedua pada tingkat penyelesaian 45% dicatat:

Kas	Rp 163.348.160
Pendapatan Kontrak	Rp 163.348.160

Persentase penyelesaian pekerjaan fisik pada penagihan termin kedua		45%
Tingkat penyelesaian pekerjaan telah ditagih terminnya	16%	
Uang muka yang telah diangsur	<u>4%</u>	<u>20%</u>
		25%
Persentase pekerjaan yang ditahan terminnya		<u>5%</u>
		20%
Angsuran uang muka penagihan termin kedua	<u>4%</u>	
		<u><u>16%</u></u>

Persentase penyelesaian pada bulan Desember telah mencapai 50%, proyek belum selesai dan masih terus berlanjut hingga periode akuntansi berikutnya. Perusahaan mengadakan *cut off* atas beban yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah

ditagih terminnya sebesar 45% dan tingkat penagihan termin selanjutnya sebesar 65%, maka *cut off* didasarkan pada tingkat 45% karena dianggap lebih dekat dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai hingga akhir tahun 2004. Dengan demikian beban proyek yang sudah dicatat diturunkan sebesar 5% (50%-45%) dikalikan dengan anggaran biaya pelaksanaan atau sebesar 5% x Rp 928.115.000, yaitu Rp 46.405.750 dan dicatat:

Beban dibayar dimuka	Rp 46.405.750
Konstruksi dalam penyelesaian	Rp 46.405.750

Tahun 2005

Pencatatan awal adalah melakukan jurnal pembalik (*reversing entries*) untuk menyesuaikan *cut off* yang dilakukan pada akhir tahun 2004 dengan mencatatnya:

Konstruksi dalam penyelesaian	Rp 46.405.750
Beban dibayar dimuka	Rp 46.405.750

Pendapatan yang diakui selama tahun 2005 sehubungan dengan proyek adalah sebesar Rp 490.044.480 yang terdiri dari:

Termin ketiga	Rp 163.348.160
Termin keempat	163.348.160
Termin kelima	112.301.860
Termin keenan	<u>51.046.300</u>
	<u><u>Rp 490.044.480</u></u>

4.2.2.2. Beban-beban yang Berhubungan dengan Pendapatan Pemborongan

Pekerjaan

Beban-beban yang dikeluarkan oleh PT “DKN” untuk menghasilkan pendapatan yang berasal dari pemborongan pekerjaan proyek ada dua, yaitu :

1. Beban proyek langsung

Beban proyek langsung adalah beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengerjaan suatu proyek dan dapat dibebankan secara langsung pada proyek tersebut.

2. Beban proyek tidak langsung

Beban proyek tidak langsung adalah beban yang dikeluarkan untuk suatu proyek tetapi tidak secara langsung dihubungkan dengan proyek tersebut.

4.3. Pembahasan

Penetapan pendapatan atas suatu pekerjaan proyek apabila menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*) maka persentase penyelesaian pekerjaan harus ditentukan terlebih dahulu. Pendapatan periode tersebut ditentukan dengan cara mengalikan persentase penyelesaian pekerjaan periode tersebut dengan harga kontrak yang telah ditetapkan, sedangkan penandingan antara beban dengan pendapatan ditentukan dengan mengalikan taksiran total biaya proyek dengan persentase penyelesaian pekerjaan pada periode tersebut.

Implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) pada PT “DKN” menunjukkan proses penandingan yang kurang tepat karena dalam mengakui

melaporkan pendapatannya didasarkan atas persentase penyelesaian pekerjaan yang dibayar oleh pemberi proyek sesuai syarat perjanjian dalam kontrak mengakibatkan pendapatan yang dilaporkan pada tahun yang bersangkutan terlalu rendah. Sedangkan beban proyek didasarkan pada pengeluaran proyek untuk mencapai persentase penyelesaian pekerjaan. Prinsip penandingan yang tepat akan tercapai apabila metode biaya terhadap biaya (*cost-to-cost basis*) digunakan dan secara spesifik, profesi akuntan merekomendasikannya. Menurut dasar biaya terhadap biaya, persentase penyelesaian diukur dengan membandingkan biaya yang sudah terjadi sampai dengan periode tersebut dengan estimasi total biaya paling akhir untuk menyelesaikan kontrak.

Ketidaktepatan lainnya adalah penggunaan metode *cash basis* dalam pengakuan dan pencatatan pendapatan dengan alasan memudahkan pencatatan. PT “DKN” tidak mengakui pendapatan yang belum benar-benar diterima meskipun seharusnya sudah diterima tetapi belum dibayar, hal ini tidak memenuhi ketepatan prinsip penandingan. Oleh karena itu PT “DKN” sebaiknya mengubah prinsip pengakuan pendapatannya berdasarkan *accrual basis* seperti dalam pengakuan beban.

PT “DKN” telah menggunakan dasar yang tidak tepat dalam menentukan pendapatan yang harus diakui dan dilaporkan. Penulis mencoba memberikan jalan untuk mengatasinya yaitu dengan mengubah dasar yang digunakan untuk menentukan pendapatan dan beban dalam suatu periode tertentu sehingga pendapatan dan beban dapat ditentukan dengan dasar yang sama.

Dasar yang tepat dalam prinsip penandingan adalah menggunakan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dalam suatu periode agar diperoleh ketepatan proses penandingan dengan menggunakan dasar yang sama dalam menentukan pendapatan dan beban.

Penentuan besarnya beban proyek, PT “DKN” menggunakan prosedur *cut off* untuk menaikkan atau menurunkan beban proyek sehubungan dengan pengakuan pendapatan. Hasil *cut off* mengakibatkan proses penandingan yang tidak tepat antara pendapatan dan beban sehingga tidak mencerminkan pendapatan (hasil usaha) yang sudah dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut dalam suatu periode.

Berikut ini akan penulis tunjukkan mengenai bagaimana jika PT “DKN” menggunakan dasar yang berbeda dari apa yang digunakan sekarang dalam menentukan pendapatan dan beban proyek. Penulis mengambil contoh proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya yaitu proyek “X” dan telah diuraikan sebelumnya dalam bagian lain seperti berikut ini:

	Dasar yang digunakan saat ini	Dasar tingkat kemajuan pekerjaan yang dicapai dalam satu periode
Pendapatan kontrak	Rp 530.881.520	Rp 510.463.000
Beban kontrak	455.419.597	464.057.500
Laba (rugi) kontrak	Rp 75.461.923	Rp 46.405.500

Pendapatan kontrak sebesar Rp 530.881.520 tidak lain adalah 52% dari harga kontrak, sedangkan beban kontrak sebesar Rp 455.419.597 dianggap sebagai beban-beban yang dikeluarkan untuk mencapai tingkat penyelesaian pekerjaan 45%.

Jumlah tersebut dihitung dari total beban selama tahun berjalan dikurangi *cut off* dikalikan anggaran biaya pelaksanaan yang dihitung :

Total biaya selama 2004	Rp 501.825.347
5% x Rp 928.115.000	<u>46.405.750</u>
	<u>Rp 455.419.597</u>

Apabila yang digunakan adalah dasar tingkat kemajuan pekerjaan yang dicapai dalam satu periode untuk tahun 2004 dengan tingkat kemajuan pekerjaan 50% maka pendapatan yang diakui adalah sebesar 50% dari harga kontrak, beban yang dilaporkan adalah pada tingkat penyelesaian 50%. Perbedaan pendapatan kontrak dari kedua dasar yang digunakan sebesar Rp 20.418.520 dan beban proyek disebabkan oleh hasil *cut off* 5% anggaran biaya pelaksanaan sedangkan untuk pendapatan kontrak akan di jelaskan sebagai berikut:

Perbedaan yang disebabkan oleh adanya uang muka proyek	
(20%-8%) x Rp 1.020.926.000	= Rp 122.511.120
Perbedaan yang disebabkan oleh dasar yang digunakan	
(50%-40%) x Rp 1.020.926.000	<u>102.092.600</u>
	<u>Rp 20.418.520</u>

Pendapatan proyek yang diakui PT "DKN" kurang 10% dari pendapatan sesungguhnya, tetapi karena adanya uang muka sebesar 12% yang diakui sebagai pendapatan proyek tahun 2005 maka selisih 2% lebih besar dari tingkat kemajuan pekerjaan yang sesungguhnya dicapai. Prosedur *cut off* oleh PT "DKN" dirasa kurang tepat, secara teoritis cara tersebut dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam proses

penandingan, sedangkan uang muka proyek sebenarnya harus tetap dianggap uang muka proyek dan baru bisa diakui sebagai pendapatan apabila diterima angsuran saat penagihan termin.

Perusahaan seharusnya menggunakan dasar tingkat kemajuan pekerjaan dalam mengakui dan melaporkan pendapatannya, bukan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang dibayar pemberi proyek sesuai dengan syarat perjanjian yang tercantum dalam kontrak seperti berikut ini:

Penagihan termin pertama (25% x harga kontrak)	Rp 255.231.500
Penagihan termin kedua (45%-25%) x harga kontrak	204.185200
Akhir periode 2004 (5% x harga kontrak)	51.046.300
	<hr/>
	Rp 510.463.000
	<hr/> <hr/>

Sebaiknya PT “DKN” mengubah dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan biaya proyeknya dengan menggunakan tingkat kemajuan pekerjaan yang dicapai dalam suatu periode. Selain itu juga perlu mengubah prinsip pengakuan pendapatannya dengan menggunakan *accrual basis* seperti dalam pengakuan beban, agar diperoleh penandingan yang tepat.

Metode *accrual basis* menekankan adanya prinsip penandingan dalam pelaporan beban dan pendapatan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa pendapatan dan laba tidak boleh diantisipasi terlalu besar atau terlalu kecil. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan implementasi prinsip penandingan (*matching principle*) dalam PT “DKN” lebih tepat, sehingga laporan keuangannya dapat disajikan secara wajar.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

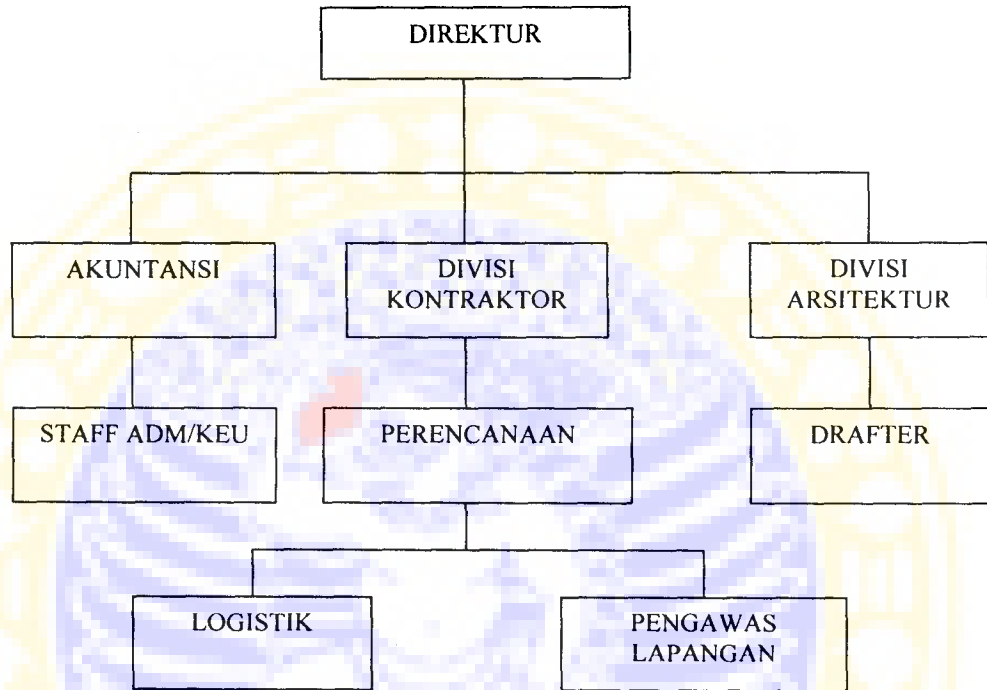
1. Perusahaan menggunakan metode *cash basis* dalam mengakui pendapatannya berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang dibayar oleh pemberi proyek sesuai dengan syarat perjanjian dan mengakui beban proyek menggunakan metode *accrual basis*, sehingga menyebabkan implementasi prinsip penandingan yang dilakukan menjadi kurang tepat karena perbedaan dasar yang digunakan.
2. Penentuan tingkat kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan tidak menggunakan dasar persentase tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dalam suatu periode sehingga beban dan pendapatan yang diakui kadang terlalu besar atau terlalu kecil sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan dapat dikatakan wajar apabila tidak ada akun yang dinyatakan terlalu besar atau terlalu kecil.

5.2. Saran

1. Perusahaan sebaiknya lebih memahami pentingnya prinsip penandingan (*matching principle*) dalam menentukan pendapatan dan beban proyek yang diakui dalam suatu periode.
2. Perusahaan perlu mengubah dasar yang digunakan, yaitu menggunakan metode *accrual basis* dalam mengakui pendapatan seperti halnya dalam mengakui beban untuk memperoleh penandingan (*matching*) yang tepat.

STRUKTUR ORGANISASI

PT "DKN"



Sumber : Intern PT "DKN"



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyanto. 2003. *Construction Project Case Management*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Baridwan, Zaki. 1999. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Edisi Keenam. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hendriksen, Eldon S. 1997. *Accounting Theory*. 4th Edition. Terjemahan. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- IAI, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield, 2004. *Intermediate Accounting*. Eleventh Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Lucas, Paul D. 1973. *Accounting Guide for Construction Contractors*. United States of America: Prentice Hall Inc.
- Suwardjono. 1986. Seri Teori Akuntansi No.1. *Pokok-pokok Pikiran Paton & Littleton Tentang Prinsip-prinsip Akuntansi untuk Perseroan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Tjahyadi, Bambang., dan D. Dewantoro, 1995. *Akuntansi untuk Industri Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi-Universitas Indonesia.
- Usry, Milton F., and Matz Adolph. 1992. *Cost Accounting*. Terjemahan. Jilid I. Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Yusuf, Al. Haryono. 1997. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jilid I. Edisi Keenam. Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN.